Hak Anak setelah Perceraian Akibat Pertengkaran Suami Istri

The Rights of the Child After Divorce Due to the Sparring of the Wife

Debora Purba & Elvi Zahara*

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

*email: elvizahara@staff.uma.ac.id

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu dambaan manusia untuk melepas kesendirian dalam mengarungi liku kehidupan. Perkawinan umumnya berlaku bagi setiap makhluk ciptaan Tuhan, baik manusia, tumbuhan maupun hewan. Pada hakikatnya perkawinan adalah rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan pelanjutan keturunan. Hak anak dibawah umur setelah perceraian, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, ayah bertanggungjawab atas semua biaya perawatan dan pendidikan anak-anak yang diperlukan, bila ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut menanggung biaya perawatan dan pendidikan anak yang dibutuhkan, kewajiban tetap berlaku meski orangtua sudag bercerai. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah; untuk mengetahui hak asuh anak yang belum dewasa akibat perceraian pasangan suami istri; untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menentukan tanggungjawab pengasuhan anak. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, sifatnya deskriptif analitis, dan sumber data untuk peneltitin ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahankepuustakaan.

Kata Kunci: Hak, Anak, Perceraian.

Abstract

Marriage is a human desire to let go of solitude in navigating the twists and turns of life. Marriage generally applies to every creature created by God, both humans, plants and animals. In essence marriage is a sense of love, obligation, fulfillment of sexual desire and continuation of offspring. Rights of minors after divorce, parents must maintain and educate their children as well as possible. In article 4 of the Marriage Law, fathers are responsible for all the costs of care and education of children needed, if the father cannot fulfill his obligations, the court can determine that the mother also bears the costs of care and education for the child also divorced. The purpose of this study is; to find out custody of minors due to divorce from a married couple; to know the judges' judgment in determining child care responsibilities. This type of research is normative juridical, descriptive analytical nature, and data sources for this research are obtained through secondary data, namely data collected through document studies on the language library.

Keywords: Rights, Children, Divorce.

How to Cite: Debora Purba & Elvi Zahra. (2017). HAK Anak Setelah Perceraian Akibat Pertengkaran Suami Istri. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4 (1) Juni 2018: 13-18.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Maswandi; 2017) Anak dari hasil perkawinan adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. (Fitriyana, 2016) Pertikaian antara suami dan istri yang berujung pada perceraian dapat mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Bilamana terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, timbul permasalahan mengenai siapakah diantara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak. Masalahnya akan menjadi lebih rumit, bilamana masing-masing dari kedua orang tua tidak mau mengalah, disebabkan ada pertimbangan prinsipil dalam pandangan kedua belah pihak. Persoalan seperti yang dikemukakan di atas sering terjadi dalam masyarakat.

Setelah perceraian itu terjadi dapat ditentukan kedudukan seorang anak tersebut jatuh kepada orang tua, baik pihak ibunya maupun pihak ayah. Yang menjadi persoalan adalah anak-anak di bawah umur, yakni anak yang belum berakal, siapa antara suami atau istri yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut.

Persepsi yang keliru beranggapan bahwa hak asuh adalah hak penuh ibunya sampai umur 12 tahun. Padahal pengadilan berada pada posisi lain, yakni ingin melindungi anak. Jadi kadang-kadang kewajiban itu dibebankan kepada bapak atau kadang-kadang dibebankan kepada kepada ibu, tergantung pada pertimbangan majelis hakim dengan melihat kepentingan anak itu bisa terpenuhi jika anak bersama bapak atau bersama ibunya.

Pembagian peran orangtua untuk menjaga, merawat, dan mendidik anak, telah diatur sedemikian rupa guna

menjaga keutuhan rumah tangga, akan tetapi tak bisa dipungkiri riak-riak yang mendera bahtera rumah tangga hingga berujung perceraian. Fenomena perceraian di Indonesia yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan signifikan, perlu mendapat perhatian oleh pihak-pihak yang terkait, karena korban dari perceraian adalah anak. (Azizi ; 2016)

Bagi anak-anak yang dalam keadaan tertentu dapat berada di bawah pengasuhan anak, yakni di asuh oleh seseorang atau lembaga untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan. Hal ini dimungkinkan bila orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. (Ibrahim, 2006) Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, 1981).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi (Abdurrahman, 1999)

Data yang diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian ini yang

merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari: 1) Buku-buku literatur; 2) Putusan-putusan pengadilan negeri dan mahkamah agung; 3) Makalah-makalah/laporan penelitian; 4) Artikel-artikel, media massa dan internet.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (*library research*), peraturan perundang-undangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemegang Hak Asuh Anak yang Belum Dewasa Setelah Perceraian Orang tua

Konflik pada pasangan suami istri tidak hanya berakhir diperceraian saja, yang menjadi *additional* konflik justru perebutan hak asuh terhadap anak yang dilahirkan pada waktu terikat perkawinan. Hak asuh ini diperebutkan bagi mereka yang mempunyai anak dibawah umur. perebutan hak asuh anak ini dilatar belakangi karena masing-masing pihak berhak untuk merawat buah hatinya. Disamping itu mereka yakin dapat membesarkan anak.

Hak asuh anak setelah perceraian ini tidak diatur didalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974. Tidak ada kata yang spesifik dalam ketentuan tersebut yang mengatakan hak asuh anak. Undang-Undang no. 1 tahun 1974 mengatakan

pada pasal 45 ayat (1) bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai.

Batasan usia untuk mendapatkan nafkah anak adalah mulai dari usia 0 hingga 21 tahun atau sampai anak tersebut menikah, baik masih terjadinya pernikahan atau sudah bercerai, terkecuali bagi anak-anak yang memiliki cacat fisik. Bagi seorang PNS, pembagian gaji untuk nafkah apabila terjadi perceraian adalah sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga). (Azizi;2016) Ketentuan hokum bagi seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak dapat dikenakan sanksi berupa perdata maupun pidana. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 77 b UU 35 tahun 2014 sanksi pidana bagi seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak di pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk anaknya.

Kewajiban ini dijabarkan dengan mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. pemahaman penulis dari kedua ketentuan diatas adalah tidak adanya penentuan hak asuh secara spesifik kepada orang tua. Jadi masing-masing orang tua pada prinsipnya memang berhak sepanjang kekuasaan mereka tidak dicabut. Akan tetapi Undang-Undang no. 1 tahun 1974 sebelumnya telah menutup kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) dengan pasal 41 ayat (1). Pasal tersebut mengatakan bahwa bila terjadi perselisihan didalam penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memutuskan.

Kompilasi hukum islam selanjutnya disebut khi mengatur tentang hak asuh anak pasca perceraian. pengaturan

tersebut juga memiliki batasan yang jelas, yaitu berlaku bagi anak yang masih dibawah 12 tahun (belum *mummayiz*). Pasal 105 KHI menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menurut Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengadilan menentukan wali anak dibawah umur. Apabila pihak yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut Pasal 230 b Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata hakim dapat mentukan sejumlah uang yang harus dibayar pihak yang lain untuk membayar sejumlah uang untuk membiayai anak dibawah umur.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pengasuhan Anak yang Belum Dewasa

Anak mempunyai hak tertentu baik hak yang menjadi kebutuhan material anak seperti sandang, pangan dan papan, maupun hak immaterial anak seperti hak beribadat, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial (Azizi, 2016)

Menurut perspektif *fiqh*, aturan nafkah lebih dibebankan kepada ayah dan seorang ibu tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya, baik itu ada suami disisinya maupun tidak ada. Baik itu perempuannya kaya, maupun miskin, seorang perempuan hanya punya kewajiban member nafkah kepada kedua orangtua dan budak yang dimilikinya (Azizi, 2016).

Menurut pandangan mazhab *syafi'iyah*, *Hannafiah* dan *Hannabillah*, apabila ayah tidak mampu menafkahi anak, maka kerabat dekat bisa mengambil alih peran ayah untuk menafkahi anaknya.

Anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayah hanyalah anak sah, sedangkan anak diluar nikah (*zinah*) tidak berhak mendapat nafkah dari ayahnya. Adapun besar atau jumlah nafkah yang diberikan kepada sang anak disesuaikan oleh kemampuan sang ayah (Azizi, 2016).

Pertimbangan hakim pada putusan yang berkeadilan, hakikatnya seperti hukum yang dibuat hakim. Oleh karena itu hakim dalam bekerja di lembaga peradilan menjadi sosok yang sentral. Tujuan hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan tidak lain karena disitu harus terdapat pertimbangan yang bernilai. memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bahkan jika terjadi benturan antara peraturan perundang-undangan, berdasarkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hakim harus dapat memprioritaskan pilihan pada nilai keadilan.

Hakim bersifat pasif dalam konteks hukum acara perdata ini untuk menunjukkan bahwa jalannya penyelesaian sengketa para pihak itu ditentukan oleh para pihak masing-masing. Hakim tidak dapat ikut serta masuk kedalam ruang lingkup masalah. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Peran hakim hanya menerima masukan, memimpin sidang, melancarkan jalannya permohonan dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencari kebenaran. Artinya hakim dimuka persidangan tidak boleh menghalang-halangi para pihak yang bersengketa baik itu untuk mengakhiri atau terus melanjutkan sengketa. Dalam setiap sengketa dipengadilan, disitu ada permohonan yang diajukan oleh penggugat. Gugatan yang diajukan oleh penggugat harus diadili seluruhnya oleh hakim. hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut

Disamping hakim yang bertindak pasif, dalam penyelesaian kasus pada hukum perdata hakim harus dapat memberikan putusannya disertai dengan alasan-alasan. Hal ini sebagaimana diatur didalam Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang menjadikan dasar untuk mengadili.

Adanya suatu alasan yang rasional dengan memperhatikan fakta yang dibawa oleh para pihak serta didasari atas dasar hukum yang benar, maka penalaran terhadap pembuatan alasan pertimbangan hukum ini menjadi obyektif. Suatu putusan yang obyektif tentunya timbul dengan beberapa dasar berpikir, dasar ini sebagai pertimbangan yang penting sebelum hakim menentukan sikapnya dalam memutus.

Pentingnya alasan pertimbangan dalam putusan ini bahkan menjadi alasan sendiri untuk hakim Mahkamah Agung agar putusan tersebut dapat dikasasi atau dibatalkan.

Inti dari pentingnya alasan dan pertimbangan ini secara tidak langsung untuk menyuruh para hakim agar selalu dapat melihat situasi dimasyarakat. Selain itu hakim dituntut selalu menambah ilmu pengetahuan hukumnya sebagai sumber dan bahan guna meletakkan argument pada putusan yang dibuatnya.

Keberadaan ilmu pengetahuan ini menjadi penting, karena sifat ilmu pengetahuan hukum itu dapat menuntun hakim agar bertindak obyektif. Sehingga hakim tidak saja selalu mendasarkan argumennya kepada norma-norma hukum semata dalam undang-undang.

Hakim cukup menggali antara fakta dan dasar hukum yang sudah ada untuk dijadikan bahan pertimbangan. Keadilan procedural ini lebih kepada keadilan hukum yang diimplementasikan sebagai kepastian hukum. Dimana keadilan ini adalah produk hukum dari undang-undang

tertulis. Jadi penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum yang adil dimasyarakat harus sesuai dengan hukum yang telah tertulis didalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelesaikan suatu perkara, seorang hakim tidak boleh berdalih, dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur tentang hal itu. Oleh karena itulah seorang hakim harus menemukan dan menentukan hukumnya. Kaedah-kaedah hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini disaring mana yang dapat dijadikan suatu hukum yang hidup dan harus dilaksanakan.

Dalam penuntutan biaya hidup bagi anak biasanya ibu yang akan bertindak mengajukan tuntutan terhadap bapak (bekas suami) apabila bekas suaminya tidak memenuhi kewajibannya dalam pemberian nafkah hidup bagi anak yang berada dalam asuhannya. Tuntutan yang dilakukan oleh ibu (bekas istri) tidak hanya mengenai pemenuhan terhadap biaya hidup dan pendidikan anak, namun juga menyangkut masalah pemeliharaan anak.

Hal seperti ini yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam beberapa putusan yang menyangkut masalah pemeliharaan anak, maka setelah bercerai dan diputuskan bahwa anak ikut dengan ibunya, maka bekas suaminya akan diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut.

Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan kasus-kasus pemeliharaan anak dan tanggung jawab nafkah anak cenderung melimpahkan tanggung jawab pemeliharaan anak kepada ibu kandungnya dan kepada pihak bapak dibebani tanggung jawab untuk memenuhi segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sehingga anak tersebut dapat berdiri sendiri.

Dalam perlindungan anak pasca perceraian tidak hanya sebatas telah terpenuhinya ketentuan Undang-undang.

Sepanjang orang tua yang telah bercerai dengan sadar dan beritikad baik mau menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada, masalah yang ditimbulkan oleh perceraian, terutama masalah anak, akan dapat diminimalkan. Mungkin ada anggapan bahwa dengan telah terpenuhinya kebutuhan fisik anak maka masalah perlindungan anak sudah selesai. Tetapi tidak sesederhana itu, sebab dalam kenyataannya walaupun telah ada putusan yang mewajibkan ayah membiayai pemeliharaan anaknya dibelakang hari ayah tersebut tidak perduli lagi dengan kewajibannya.

SIMPULAN

Mengenai yang berhak mengasuh anak yang belum dewasa setelah terjadinya perceraian kedua orang tua wajib memelihara, mendidik anak mereka serta untuk bapak agar dapat menafkahi anak tersebut hingga ia dewasa. Karena itu tidak benar jika salah satu dari orang tua menganggap ia yang lebih berhak memelihara anak hanya dengan melihat kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan anak dari segi materilnya saja. Namun perlindungan anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan secara lahir dan batin. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tentang hak asuh anak yang

belum dewasa, hakim adalah memberikan kewajiban untuk memelihara anak-anak dan pendidikan mereka baik pada ayah maupun ibu dan perselisihan tentang kekuasaan orang tua diputuskan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, Y.C.S.T. (1979), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Bahari, A, (2012), Prosedur Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono Gini Hak Asuh Anak, Pustaka, Yogyakarta.
- Emaningsih, W. & Samawati, P. (2008), Hukum Perkawinan Indonesia, Palembang: PT. Rambang Palembang.
- Gultom, M, (2006), Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Hazairin, (1975), Tinjauan mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Tinta Mas Jakarta.
- Kitab Undang – undang Hukum Perdata (BW)
- Prakoso, D. (1987), Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
- Prins, J. (1982), Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Undang-undang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Wadong, M.H, (2000), Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo Widya Sarana Indonesia, Jakarta.
- Zainuddin, A, (2010), Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.